



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 April 2017

Halaman: 13

Pengamen Angklung Minta Larangan Beroperasi Dicabut

YOGYA, TRIBUN - Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) yang terdiri dari 15 komunitas angklung di DIY menggelar aksi di depan gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (10/4).

Aksi ini menuntut kepada Gubernur DIY dan Satpol PP DIY untuk mencabut surat peringatan (SP) satu dan kedua tentang pelanggaran operasi pengamen angklung di DIY.

Sugianto direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa pada saat aksi mengatakan, pekerja seni angklung tidak pernah mengganggu ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki di trotoar.

"Karena masih banyak ruang yang tidak terpakai dan tempatnya tidak permanen.



DEMO ANGKLUNG - Paguyuban Angklung Yogyakarta berdemo di DPRD DIY, Senin (10/4). Mereka menuntut pencabutan surat peringatan dari Satpol PP tentang pelanggaran beroperasinya seniman angklung jalanan.

● ke halaman 14

Pengamen Angklung

● Sambungan Hal 13

Pelaku atau pekerja seni angklung bukanlah masuk dalam kategori gelandangan dan pengemis," ucapnya.

Ratusan massa yang tergabung PAY berjalan dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD sambil bermain musik angklung dan membawa pesan aksi yang dituliskan di atas kertas 'Kami Seniman Bukan Gelandangan'.

Terpisah, Kepala Satpol PP DIY, Gusti Bendara Pa-

ngeran Haryo (GBPH) Yudaningrat menjelaskan, sebenarnya pemain angklung tersebut telah diberikan tempat khusus untuk tetap bermain musik, bukan di simpang jalan seperti yang terjadi saat ini.

"Sudah disiapkan tempat. Mereka istilahnya dagang sudah jadi, jadi berkeberatan tidak mau di tempatkan. (Tempat baru) Ada di Malioboro, '(Jalan) Mangkubumi, pokoknya yang ramai di depan hotel-hotel. Sebenarnya sudah diberikan solusi zonasi. Itu sudah disiapkan pihak Pemkot (Yogyakarta)," tegasnya di DPRD DIY, Senin (10/4).

Pria yang akrab disapa Gusti Yuda tersebut menuturkan, penataan pemain angklung menjadi arahan Kepala Dinas Pariwisata. Mereka ditata namun tetap ditempatkan di tempat ramai, bukan di jalanan. Hal tersebut diakuinya sudah dikomunikasikan kepada pemain angklung, komunitas mereka, dan juga LBH yang mendampingi.

Disinggung soal SP larangan operasi angklung jalanan, dengan tegas ia menyatakan bahwa tidak akan mencabutnya. "Kalau itu dicabut saya yang kena. Itu kan konsepnya. Pol PP penegakkan Perda," imbuhnya. (trs/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005